

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2017
NOMOR : SP DIPA- 005.03.2.099067/2017**

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 18 Tahun 2016 tentang APBN TA 2017.

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (005) | MAHKAMAH AGUNG |
| 2. Unit Organisasi | : (03) | DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM |
| 3. Provinsi | : (02) | JAWA BARAT |
| 4. Kode>Nama Satker | : (099067) | PENGADILAN TINGGI BANDUNG |
| Sebesar | : Rp. | 211.590.000 (DUA RATUS SEBELAS JUTA LIMA RATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.03.07	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	211.590.000
005.03.07.1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	211.590.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	211.590.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN BANDUNG II	(095) Rp.	211.590.000
--------------------	-----------	-------------

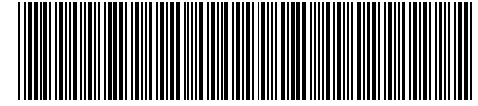
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan(Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

Jakarta, 07 Desember 2016
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2017
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099067/2017
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:8278-9399-8439-4898

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Provinsi : (02) JAWA BARAT
Kode>Nama Satker : (099067) PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Kuasa Pengguna Anggaran : Drs. YOYO
Bendahara Pengeluaran : ALJUNALLIADI, SE.
Pejabat Penanda Tangan SPM : ARY FARIDAH, S. Si

Halaman : I A. 1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN		211.590.000
Sub Fungsi	03.04	PERADILAN		211.590.000
2 Program	005.03.07	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		211.590.000
Hasil (Outcome)	01	Terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan peradilan umum		
IKU Program	01	Terselenggaranya penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel		
	02	Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan peradilan umum		
	03	Terselenggaranya pembinaan tenaga teknis peradilan umum		
	04	Terselenggaranya Tata Laksana Perkara Kasasi, PK dan Grasi		
Kegiatan	1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		211.590.000
Indikator Kinerja Kegiatan	001	Pedoman Tata Kelola di Lingkungan Peradilan Umum		
	002	Jumlah Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum		
	003	Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan		
	004	Jumlah Penyelesaian Perkara PHI (di bawah 150 jt) di Lingkungan Peradilan Umum		
	005	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara		
	006	Tenaga Teknis Peradilan Umum yang Kompeten dibidang Gugatan Sederhana (SCC) dan SIPP		
	007	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu		
	008	Penyelesaian Perkara Perikanan		
	009	Pelaksanaan SPPT/SPPA/MEDIASI/SCC		
Keluaran (Output)	1049.005	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	763,00 Perkara	211.590.000

Jakarta, 07 Desember 2016
Direktur Jenderal Badilum

ttd.

Herri Swantoro, SH, MH
195909041984031004

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2017
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099067/2017
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:8278-9399-8439-4898

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Provinsi : (02) JAWA BARAT
Kode>Nama Satker : (099067) PENGADILAN TINGGI BANDUNG
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
099067	PENGADILAN TINGGI BANDUNG	-	211.590	-	-	-	211.590		
005.03.07	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-	211.590	-	-	-	211.590		
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-	211.590	-	-	-	211.590		
1049.005	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	-	211.590	-	-	-	211.590	02 . 51	
01	RM	-	211.590	-	-	-	211.590	095	
JUMLAH		-	211.590	-	-	-	211.590		

Jakarta, 07 Desember 2016
Direktur Jenderal Badilum

ttd.
Herri Swantoro, SH, MH
195909041984031004

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2017
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099067/2017
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:8278-9399-8439-4898

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Provinsi : (02) JAWA BARAT
Kode>Nama Satker : (099067) PENGADILAN TINGGI BANDUNG

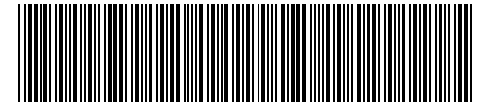
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	099067	PENGADILAN TINGGI BANDUNG													
		RENCANA PENARIKAN DANA	1.947	4.316	7.575	11.595	12.188	13.542	23.508	22.873	24.798	25.306	28.332	35.610	211.590
		52 BELANJA BARANG	1.947	4.316	7.575	11.595	12.188	13.542	23.508	22.873	24.798	25.306	28.332	35.610	211.590
	005.03.07.1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1.947	4.316	7.575	11.595	12.188	13.542	23.508	22.873	24.798	25.306	28.332	35.610	211.590
		52 BELANJA BARANG	1.947	4.316	7.575	11.595	12.188	13.542	23.508	22.873	24.798	25.306	28.332	35.610	211.590

Jakarta, 07 Desember 2016
Direktur Jenderal Badilum

ttd.
Herri Swantoro, SH, MH
195909041984031004

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2017
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099067/2017
IV. C A T A T A N**



DS:8278-9399-8439-4898

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Provinsi : [02] JAWA BARAT
Kode dan Nama Satker : [099067] PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Halaman : IV. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 07 Desember 2016
Direktur Jenderal Badilum

ttd.
Herri Swantoro, SH, MH
195909041984031004